



MIMBAR ALAT KELENGKAPAN DEWAN  
 **DPRD KOTA YOGYAKARTA**

**BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

## Targetkan 14 Produk Hukum, Kejar Pembahasan Awal Waktu

**YOGYA (KR)** - Sama seperti tahun 2022 lalu, pada tahun ini Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Yogyakarta menargetkan 14 produk hukum. Seluruhnya sudah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) dan telah mendapatkan pengesahan. Proses pembahasannya pun dikejar di awal waktu agar segera mendapatkan nomor registrasi serta dapat disosialisasikan ke masyarakat.

Bapemperda menjadi salah satu alat kelengkapan dewan yang memiliki peran sentral. Hal ini berkaitan dengan salah satu penunjang ketegasan dewan dalam hal legislasi. Di Kota Yogyakarta, Bapemperda diisi oleh sepuluh wakil rakyat. Dua orang anggota merangkap sebagai pimpinan yakni Tri Waluko Widodo sebagai ketua dan Emanuel Ardi Prasetya selaku wakil ketua. Merujuk tata tertib DPRD, Bapemperda

memiliki tugas dan wewenang dalam mengorganisasikan pembentukan peraturan daerah mulai dari proses perencanaan, usulan hingga penetapan. Sedangkan dalam proses pembahasan di tiap rancangan peraturan daerah, Bapemperda dibantu oleh panitia khusus (pansus) yang dibentuk melalui sidang paripurna.

Ketua Bapemperda DPRD Kota Yogyakarta Tri Waluko Widodo, menjabarkan dari total 14 produk hukum yang ditargetkan pada tahun ini, tiga produk hukum di antaranya bersifat wajib. Hal ini karena berkaitan dengan anggaran dan penyelenggaraan pemerintahan yakni APBD 2024, APBD Perubahan 2023 dan Pertanggung jawaban APBD 2022. Selain itu terdapat lima produk hukum yang diinisiasi oleh kalangan dewan, dan sisanya merupakan inisiatif eksekutif.

"Tahun lalu ada empat produk hukum yang inisiatifnya dari dewan, se-



KR-Ardhi Wahdani  
**Tri Waluko Widodo**



KR-Ardhi Wahdani  
**Emanuel Ardi Prasetya**

mentaranya sudah dibahas melalui tim pansus. "Pada bulan Maret ini akan ada lima produk hukum lagi yang akan dibahas. Keanggotaan pansus juga sudah kami siapkan agar bisa segera berjalan. Di luar target dalam Propemperda 2023 ini, kami juga siapkan produk hukum untuk pokok pikiran dewan. Ini juga akan kami bahas mulai Maret," urainya.

Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kota Yogyakarta Emanuel Ardi Prasetya, menambahkan skema pembahasan Propemperda tahun ini juga tidak akan berbeda dengan tahun lalu. Setiap pansus berisi paling banyak 15 anggota dewan. Bapemperda DPRD Kota Yogyakarta memberikan tenggat waktu paling lama tiga bulan bagi pansus

dalam merampungkan pembahasan. Sepanjang tahun lalu, kinerja pansus pun dinilai sangat baik karena belum ada yang sampai melampaui tenggat waktu. "Tahapan di pansus memang cukup panjang mulai dari pendalaman materi bersama mitra kerja, mencari data pembandingan hingga rapat dengar pendapat umum dengan melibatkan masyarakat. Tetapi tiga bulan itu kami nilai cukup, dan ternyata mampu di jalankan dengan baik," urainya.

Ardi mengaku, pihaknya juga telah mengevaluasi kinerja pansus sepanjang tahun 2022 lalu. Seluruhnya mampu menjalankan kinerja secara positif lantaran tidak ada produk hukum yang sampai molor atau tertunda. Oleh karena itu, dirinya pun berharap kinerja pansus pada tahun ini dalam membahas produk hukum bisa dipertahankan bahkan ditingkatkan. Bukan tidak mungkin, jika semua produk hukum mam-



KR-Ardhi Wahdani  
**Bapemperda menggelar rapat kerja dengan tim eksekutif.**



KR-Ardhi Wahdani  
**Tim eksekutif dari Bagian Hukum Setda Kota Yogya rapat kerja dengan Bapemperda.**



KR-Ardhi Wahdani  
**Ketua Bapemperda memimpin jalannya rakan pembahasan produk hukum.**



KR-Ardhi Wahdani  
**Pansus Raperda Penyertaan Modal melakukan pembahasan produk hukum.**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Juli 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005